

ABSTRAK

DINAMIKA GEOPOLITIK DALAM SENGKETA DI LAUT TIONGKOK SELATAN, TAHUN 2013-2023

Oleh

ULFA PUTRI AMELIA

Konflik di Laut Tiongkok Selatan dipicu Tiongkok yang mengklaim 90 persen teritorial perairan tersebut sebagai wilayah kedaulatannya. Klaim tersebut menimbulkan sengketa tumpang tindih wilayah dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Idealnya, penyelesaian sengketa ini dilakukan secara damai sesuai dengan hukum internasional. Namun, realitanya negara pengklaim mengambil langkah-langkah kebijakan yang tidak sejalan dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS. Ketegangan di Laut Tiongkok Selatan pun tak teralakkan. Lantas, “Bagaimana dinamika geopolitik di Laut Tiongkok Selatan?”

Pertanyaan tersebut dicoba untuk dijawab menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan berfokus pada interaksi antara negara pengklaim dalam periode 2013-2023. Data utama diperoleh dari wawancara dengan diplomat Kementerian Luar Negeri Indonesia, sementara data sekunder diambil dari literatur termasuk buku, artikel, dan jurnal dari lembaga *think tank* seperti NBR, NIDS Japan, CSIS, dan JSTOR. Data dianalisis menggunakan teknik kondensasi dan triangulasi data.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei menggunakan hukum internasional dan aliansi strategis untuk melindungi kedaulatan, sementara Tiongkok memperkuat klaimnya dengan membangun instalasi di wilayah sengketa. Dengan teori geopolitik dan konsep-konsep seperti *structure, agency, dan codes*, penulis menjelaskan kepentingan negara-negara melalui interaksi antar *claimant states*. Akibatnya, dua kekuatan *superpower* yang berlawanan terbentuk di Asia-Pasifik, mendorong ASEAN untuk berperan sebagai kekuatan penengah (*middle power*) dalam menjaga stabilitas regional.

Kata Kunci: ASEAN, geopolitik, kepentingan, Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok.

ABSTRACT

GEOPOLITICAL DYNAMICS IN THE SOUTH TIONGKOK SEA DISPUTE, 2013-2023

By

ULFA PUTRI AMELIA

The conflict in the South China Sea was triggered by China's claim over 90% of the maritime territory as part of its sovereign domain. This claim has resulted in overlapping territorial disputes with the Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei Darussalam. Ideally, these disputes would be resolved peacefully in accordance with international law. However, in practice, the claimant states have pursued policies that diverge from the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). As a result, tensions in the South China Sea have become unavoidable. This raises the question: "What are the geopolitical dynamics in the South China Sea?" This question is explored using a qualitative approach with descriptive analysis, focusing on the interactions between claimant states from 2013 to 2023. Primary data was obtained through interviews with diplomats from Indonesia's Ministry of Foreign Affairs, while secondary data was sourced from literature, including books, articles, and journals from think tanks such as NBR, NIDS Japan, CSIS, and JSTOR. The data was analyzed using condensation and triangulation techniques. The analysis reveals that the Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei have relied on international law and strategic alliances to defend their sovereignty, while China has strengthened its claims by constructing installations in disputed areas. Using geopolitical theory and concepts such as structure, agency, and codes, the author explains the interests of these nations through their interactions. Consequently, two opposing superpowers have emerged in the Asia-Pacific, positioning ASEAN as a middle power in maintaining regional stability.

Keywords: ASEAN, geopolitics, interests, South Tiongkok Sea, Tiongkok.